



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si

Jabatan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: H. RUSDY MASTURA

Jabatan

Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji akan :

- Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
- Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari

2024

PIHAK KEDUA GUBERNUR SULAWESI TENGAH PIHAK PERTAMA, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

ors. MOHAMAD NADIR, M.Si

NIP. 19660816 198603 1 009

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	- Indeks Desa Membangun	0,7078

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.947.150.717	APBD
2	Program Penataan Desa	2.820.522.580	APBD
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	345.000.050	APBD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.484.320.637	APBD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	6.934.171.977	APBD

Palu, 13 Februari 2024

PIHAK KEDUA GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

<u>Ors. MOHAMAD NADIR, M.Si</u> NIP. 19660816 198603 1 009



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: WARHAM LUMBENGI, SE, MM

Jabatan

: Sekretaris Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si

Jabatan

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji:

- 1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
- 2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si NIP. 19660816 198603 1 009 PIHAK PERTAMA SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

WARHAM LUMBENGI, SE, MM NIP. 19710228 200212 1 005

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80	
	a. Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
	b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Tepat Waktu	b. Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	100%	
	c. Meningkatnya Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Kegiatan yang tepat waktu	c. Persentase Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Kegiatan yang tepat waktu	100%	
	d. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan Aset	d. Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100%	
	e. Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksanaan (TLHP)	e. TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	60%	
	f. Meningkatnya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	f. Persentase peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	
	g. Meningkatnya Profesional ASN Perangkat Daerah	g. Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	60	
	h. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan	h. Persentase ketersediaan kebutuhan barang dan jasa penunjang pelayanan	100%	
	i. Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang dan Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	i. Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	60	

j. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan	j. Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
k. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan	k. Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

No	Program	A	nggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 1	2.947.150.717	APBD
	Kegiatan :Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	119.346.650	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1	0.483.027.353	
	Kegiatan :Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	49.809.900	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	53.704.850	
	Kegiatan :Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	960.915.954	
	Kegiatan :Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	266.997.350	
	Kegiatan :Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	457.629.560	
	Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	555.719.100	

Palu, 15 Februari 2024

Pihak Kedua KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si NIP. 19660816 198603 1 009 Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

<u>warham lumbengi, se, mm</u> nip. 19710228 200212 1 005



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak pertama** berjanji:

- 1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
- 2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP.)

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, 15 Februari 2024

Pihak Kedua KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si NIP. 19660816 198603 1 009 Pihak Pertama, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DESA

MOHAMMAD IQUAL, S.STP, M.Si

NIP. 19820527 200012 1 001

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa oleh BUMDes/BUMDesma	Persentase BUMDes/BUMDesma yang telah memanfaatkan Potensi Desa	2%
	- Meningkatnya pemanfaatan potensi desa oleh BUMDes/BUMDesma dalam kawasan perdesaan	Persentase Bumdes / BUMDESma dalam kawasan perdesaan yang memanfaatkan potensi desa	23%
2	Meningkatnya Layanan	Persentase BUMDes yang	32%
	BUMDes	meningkat layanan usahanya	
	- Meningkatnya kapasitas BUMDes	Persentase BUMDes yang meningkat kapasitanya	32%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan dalam pengembangan usaha ekonomi	24%
	- Meningkatnya pelibatan masyarakat miskin ektreem dalam unit usaha BUMDes	masyarakat Persentase masyarakat miskin ekstreem yang dilibatkan dalam unit usaha BUMDes	14%
4	Meningkatnya Pendayagunaan	Pesentase Posyantek yang	38%
	Posyantek dalan Penerapan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk Pemberdayaan Masyarakat	berdayaguna dalam penerapan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
	- Terpenuhinya pembinaan Posyantek dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk Pemberdayaan Masyarakat	- Persentase Posyantek yang terbina dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk Pemberdayaan Masyarakat	25%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Peningkatan Kerja Sama Desa Kegiatan :Fasilitasi Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan Provinsi	Rp. 244.999.950	APBD
2	Program Administrasi Pemerintah Desa Kegiatan :Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.824.490.737	APBD
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum adat Kegiatan : Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 668.496.942	APBD

Palu, 15 Februari 2024

Pihak Kedua KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dfs. MOHAMAD NADIR, M.Si NIP, 19660816 198603 1 009 Pihak Pertama, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DESA

MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si NIP. 19820527 200012 1 001



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si

NIP

: 19770820 200003 2 003

Jabatan

: Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si

NIP

: 19660816 198603 1 009

Jabatan

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak pertama** berjanji:

- 1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
- 2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, 15 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si NIP. 19660816 198603 1 009 Pihak Pertama, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si NIP. 19770820 200003 2 003

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator	Target	
1	Meningkatnya pemberdayaan LKD dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjalankan fungsinya	19,96%	
	Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi LKD dan TMMD dalam Pemberdayaan masyarakat desa	- Persentase kebutuhan fasilitasi yang dipenuhi LKD dan TMMD	7,05%	

No

Program

Anggaran (Rp)

Keterangan

1. Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat
Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat
Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Rp. 6.265.675.035 APBD

Palu, 15 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si NIP. 19660816 198603 1 009 Pihak Pertama, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si NIP. 19770820 200003 2 003



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: EMY, S.Sos, MM

Jabatan

: Kepala Bidang Penataan Desa dan Perkembangan Desa

Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si

Jabatan

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak pertama** berjanji:

- 1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
- 2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si

NIP. 19660816 198603 1 009

PIHAK PERTAMA KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA

EMY, S.Sos, MM NIP. 19680628 198903 2 011

Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertata kelembagaan Pemerintahan Desanya	82%
- Meningkatnya penataan Lembaga Pemerintahan Desa sesuai regulasi	- Persentase desa yang terfasilitasi dalam penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa sesuai regulasi	8,70
Meningkatnya status Perkembangan Desa dan Kelurahan berdasarkan Epdeskel	Persentase desa dan kelurahan kategori kurang berkembang yang meningkat statusnya	46,30%
- Meningkatnya Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	- Persentase desa dan kelurahan yang terevaluasi perkembangannya	35,53%
Meningkatnya data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat	Persentase peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat	80,29%
- Meningkatnya ketersediaan dan pemutahiran data profil Desa dan Kelurahan	- Persentase desa yang meningkat ketersediaan dan pemutahiran data Profil Desanya	11,02%
Meningkatnya penataan kewilayahan desa	Persentase Desa yang tertata kewilayahannya sesuai regulasi	3,86%
- Meningkatnya fasilitasi penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa	Persentase peningkatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	2,05%
	Meningkatnya Penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa - Meningkatnya penataan Lembaga Pemerintahan Desa sesuai regulasi Meningkatnya status Perkembangan Desa dan Kelurahan berdasarkan Epdeskel - Meningkatnya Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Meningkatnya data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat - Meningkatnya ketersediaan dan pemutahiran data profil Desa dan Kelurahan Meningkatnya penataan kewilayahan desa - Meningkatnya fasilitasi penyelesaian penetapan	Meningkatnya Penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa - Meningkatnya penataan Lembaga Pemerintahan Desa sesuai regulasi Meningkatnya status Perkembangan Desa dan Kelurahan berdasarkan Epdeskel - Meningkatnya Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Meningkatnya data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat Meningkatnya ketersediaan dan pemutahiran data profil Desa dan Kelurahan Meningkatnya penataan kewilayahan desa Meningkatnya penataan kewilayahan desa Meningkatnya penataan kewilayahan desa Meningkatnya fasilitasi penyelesaian penetapan

No	Program	Anggaran (Rp)		Keterangan
1.	Program Penataan Desa Kegiatan : Penatausahaan Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa dan adat	Rp.	59.999.950,-	APBD
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	305.000.050,-	APBD

Palu, 15 Februari 2024

PIHAK PERTAMA KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA

EMY, S.Sos, MM NIP. 19680628 198903 2 011

PIHAK KEDUA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dis. MOHAMAD NADIR, M.Si NIP. 19660816 198603 1 009



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak pertama** berjanji:

- 1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
- 2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, 15 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si NIP. 19660816 198603 1 009 Pihak Pertama, KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si NIP. 19860519 200412 1 003

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat	8,46%
	rememitanan besa	layananan kemasyarakatannya	
	Meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintah Desa	- Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat ketersediaan sarana dan prasarananya	1,14%
2	Meningkatnya Kerjasama antar desa	Persentase peningkatan Kerjasama Desa	2,44%
	- Meningkatnya Kerjasama antar desa antar kabupaten/kota	Persentase Desa yang terbina dalam pelaksanaan kerjasama desa antar kabupaten/kota/ jumlah total desa	1,62%
3	Meningkanya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien	Persentase Pemerintah desa yang meningkat tata kelola Pemerintahannya	30,51%
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	- Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	5%

No	Program	A	\nggaran	Keterangan
1.	Program Penataan Desa Kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan desa	Rp. 2	2.760.522.630	APBD
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama desa dengan pihak ketiga	Rp.	100.000.100	APBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Rp.	354.829.850,-	APBD
	Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa			

Pihak Kedua KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si NIP. 19660816 198603 1 009 Pihak Pertama, KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si NIP. 19860519 200412 1 003



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: LINGGO PANDIT WARDANI, SH, M.Si

NIP

: 19680828 200212 1 005

Jabatan

: Kasubag Kepegawaian dan Umum Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

WARHAM LUMBENGI, SE, MM

Jabatan

Sekretaris Dinas PMD Prov. Sulteng

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak pertama** berjanji:

- 1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
- 2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, 15 Februari 2024

Pihak Kedua SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

WARHAM LUMBENGI, SE, MM

NIP. 19710228 200212 1 005

Pihak Pertama, KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

LINGGO PANDIT WARDANI, SH, M.Si NIP. 19680828 200212 1 005

No	Sasaran Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Target
	- Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
	- Terlaksananya Sosialiasi Peraturan Perundang- Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialiasi Peraturan Perundang Undangan	12 Orang 5 Kali
	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	- Tersedianya Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
	- Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 	4 Paket
	- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 	1 Paket
	- Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
	- Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik yang di Sediakan	12 Laporan
	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas Atau Kenderaan Dinas Jabatan	- Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas Atau Kenderaan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit

- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	20 Unit
- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/direhabilitasi	1 Paket
Tersedianya Paket MebelTersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Paket 23 Unit
 Terfasilitasinya Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah 	_	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	1 Laporan

No 1	Kegiatan dan Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Anggaran (Rp) Rp. 53.704.850	Keterangan APBD
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 11.219.850	APBD
	Sosialiasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 42.485.000	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 960.915.954	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 25.008.970	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 96.189.084	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 50.000.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 30.000.100	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 759.717.800	APBD
3	Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 457.629.560	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Rp. 457.629.560	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 555.719.100,-	APBD

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas Atau Kenderaan Dinas Jabatan	Rp.	160.919.100,-	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	194.800.000,-	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	200.000.000,-	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Rp. 2	266.997.350	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2	266.997.350	APBD
5		Rp. 2	2 66.997.350 23.535.000	APBD APBD

Palu, 15 Februari 2024

Pihak Kedua SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

WARHAM LUMBENGI, SE, MM NIP. 19710228 200212 1 005 Pihak Pertama KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

LINGGO PANDIT WARDANI, SH, M.Si NIP. 19680828 200212 1 005



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: INGE MOGA LESTARI, S.Pi, M.Si

Jabatan

: Kasubag Keuangan dan Asset Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama

: WARHAM LUMBENGI, SE, MM

Jabatan

: Sekretaris Dinas PMD Prov. Sulteng

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak pertama** berjanji:

- 1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
- 2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 Februari 2024

Pihak Kedua SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

WARHAM LUMBENGI, SE, MM

NIP. 19710228 200212 1 005

Pihak Pertama, KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

INGE MOGA LESTARI, S.Pi, M.Si NIP. 19761005 200112 2 003

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	 Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Kewajiban Pembayaran Kegiatan 	 Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan Jumlah Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya 	64 Orang/Bulan 12 Kegiatan
	- Tersusunnya Laporan Keuangan	- Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	13 Laporan
	- Tersusunnya laporan penyelesaian TLHP BPK dan APIP	- Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK dan APIP	4 Laporan Hasil Penyelesaian TLHP
į	- Tersedianya data penatausahaan BMD dan Laporan Barang Persediaan	- Jumlah Laporan Inventarisasi BMD dan laporan Barang Persediaan	2 Laporan
	- Tersusunnya neraca aset	- Jumlah aset yang tercatat	1 Laporan

No 1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran (Rp) Rp. 10.483.027.353,-	Keterangan APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 9.242.817.803,-	APBD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 1.193.579.700,-	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 46.629.850,-	APBD

2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Rp.49.809.900,-

APBD

Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Rp. 49.809.900,-

APBD

Palu, 15 Februari 2024

Pihak Pertama, **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN** DAN ASSET

INGE MOGA LESTARI, S.Pi, M.Si

NIP. 19761005 200112 2 003

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NIMASYARAKAT DAN DESA

Pihak Kedua

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN

WARHAM LUMBENGI, SE, MM NIP. 19710228 200212 1 005